

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HS, Salim. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mukarom, Zaenal., Muhibun Wijaya Laksana 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta : UII Press.
- Salim, Emil. 2010. *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryatono. 2003. *Good mining Practice Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Semarang: Studi Nusa.
- Terry, G.R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Skripsi/Tesis

Nadirzen, 2014. "Pengelolaan Sektor Pertambangan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Kec.Koto VII Kab. Sijunjung". *Tesis*. Padang: Pascasarjana Universitas Andalas.

Andrea Yudhistira, 2016. "Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Muhammad Ikhsan. 2016. "Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok Selatan". *Skripsi*. Padang : Universitas Andalas.

Jurnal

Hartati. 2012. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal masalah-masalah hukum*, 41(4) : 529-539

Usman,Dudi Nasrudin,et.al., 2017. "Good Mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 5(1): 1-7

Regulasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pmebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Internet

Candra, Sapto Andika. 2017. *Sumbar Diminta Tegas Cabut Izin Tambang Bermasalah*. <http://irwan-prayitno.com>, di akses 17 September 2017.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengumuman C&C Tahap ke XXV. <https://www.minerba.esdm.go.id>, diakses 9 Agustus 2017.

Padang Ekspres. 2017. *Mengawasi Pertambangan Daerah di Era Otonomi Daerah UU No.23/2014*. www.m.padek.co, diakses 28 Agustus 2017.

RRI.co.id. 2017. *Setengah Tahun 32 Tambang Menyalahi Aturan Ditetapkan di Sumbar*. www.rri.co.id, diakses 5 November 2017.

Sumbartoday. 2016. *LBH Padang : Penindakan Tambang Di Sumbar Lemah*. www.sumbartoday.com, diakses 25 September 2017.

Transparency International Indonesia. 2017. *Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rawan Korupsi*. www.ti.or.id, diakses 27 Maret 2018

